



Islam dalam Pusaran Politik Digital: Tantangan dan Peluang Moderasi Beragama yang Berlanjutan di Era Society 5.0

Moh Fahrul^{1*}

¹Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam

Penulis Korespondensi: Moh Fahrul E-mail: fahrulmoh455@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

Volume: 5

ISSN: 2962-7257

KATAKUNCI

Islam, Politik Digital, Moderasi Beragama, Society 5.0, Politik Identitas, Media Sosial

ABSTRAK

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental pola komunikasi sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Indonesia. Media sosial tidak hanya menjadi ruang demokrasi baru, tetapi juga arena kontestasi narasi agama dan politik yang sarat kepentingan. Fenomena politik identitas, disinformasi, dan polarisasi berbasis agama semakin menguat dalam ruang digital Indonesia, khususnya sejak kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pemilihan Presiden 2019 dan 2024. Era Society 5.0 menghadirkan integrasi antara teknologi dan kehidupan manusia yang berdampak pada perubahan otoritas keagamaan dan perilaku politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan serta peluang moderasi beragama dalam dinamika politik digital di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) dan analisis kritis, hasil penelitian menunjukkan bahwa politik digital menciptakan ruang partisipasi baru bagi umat Islam, namun juga memperbesar potensi fragmentasi sosial akibat algoritma media, *echo chamber*, dan instrumentalisasi agama oleh elit politik. Moderasi beragama menjadi pendekatan strategis dalam membangun ruang publik digital yang inklusif, kritis, dan berorientasi pada nilai kebangsaan.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital telah mengubah secara signifikan struktur komunikasi politik masyarakat modern. Media sosial seperti Facebook, Twitter/X, Instagram, TikTok, dan WhatsApp telah menjelma menjadi ruang publik virtual yang memengaruhi opini, identitas, dan preferensi politik masyarakat secara masif. Menurut data We Are Social dan Hootsuite (2023), pengguna internet Indonesia mencapai 212,9 juta jiwa atau sekitar 77 persen dari total populasi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia (Nasrullah, 2015: 23).

Dalam konteks Indonesia, agama khususnya Islam sebagai agama mayoritas kerap digunakan sebagai instrumen legitimasi politik dalam kontestasi demokrasi. Fenomena ini semakin kentara dalam peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017, yang ditandai oleh mobilisasi massa berbasis identitas agama dan pemanfaatan media digital secara intensif. Studi Mietzner dan Muhtadi (2018) menegaskan bahwa kontestasi tersebut telah memperlihatkan bagaimana agama berubah fungsi dari nilai moral menjadi komoditas politik digital yang efektif dalam memobilisasi massa (Mietzner & Muhtadi, 2018: 261).

¹Mahasiswa Program Studi Magister PAI UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-5 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Beberapa fenomena yang mengemuka seiring digitalisasi politik Indonesia antara lain: maraknya politik identitas berbasis agama, aktivitas buzzer politik, penyebaran hoaks dan disinformasi keagamaan, ujaran kebencian di ruang digital, serta polarisasi sosial yang semakin mendalam. Penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2019 menemukan bahwa hoaks dan berita palsu telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi persepsi publik terhadap kontestasi politik nasional (Burhani, 2019: 62). Di sisi lain, otoritas keagamaan mengalami pergeseran signifikan, dari ulama tradisional yang berpusat di pesantren dan majelis taklim, menuju influencer agama digital yang hadir di berbagai platform media sosial. Pergeseran ini menurut Wahid (2020) tidak hanya mengubah cara masyarakat mengakses pengetahuan agama, tetapi juga mengubah cara masyarakat memahami hubungan antara agama dan politik (Wahid, 2020: 45).

Era Society 5.0 sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada 2016 menekankan integrasi antara dunia fisik dan siber melalui Artificial Intelligence (AI) dan big data. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pusat perkembangan teknologi, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru dimana algoritma media sosial membentuk cara berpikir, cara beragama, bahkan cara berpolitik masyarakat secara halus namun masif (Prasetyo & Trisyanti, 2018: 3). Moderasi beragama, sebagaimana dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020, menjadi pendekatan strategis untuk menjaga harmoni sosial dan ketahanan demokrasi. Namun, moderasi beragama menghadapi tantangan struktural yang kompleks tidak cukup hanya dengan kampanye normatif, tetapi harus mampu merespons dinamika algoritma digital dan kepentingan politik yang bekerja dalam ruang virtual (Kementerian Agama RI, 2019: 15).

Berangkat dari konteks itulah, penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga persoalan pokok yang saling berkaitan: bagaimana transformasi relasi Islam dan politik berlangsung dalam ruang digital di era Society 5.0; apa saja tantangan utama yang dihadapi moderasi beragama dalam pusaran politik digital Indonesia; serta bagaimana peluang dan strategi konkret yang dapat ditempuh untuk memperkuat moderasi beragama dalam menghadapi polarisasi digital yang kian mengeras. Ketiga persoalan tersebut menjadi benang merah yang mengarahkan seluruh analisis dalam penelitian ini.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Islam dan Politik di Indonesia

Relasi antara Islam dan politik di Indonesia merupakan tema yang telah menjadi perdebatan panjang sejak masa pra-kemerdekaan. Berbagai pemikir Islam Indonesia telah memberikan kontribusi penting dalam memetakan hubungan tersebut. Nurcholish Madjid (1970) dalam gagasan sekularisasi dan pembaruan Islamnya menegaskan bahwa Islam tidak harus diwujudkan dalam bentuk negara Islam, melainkan cukup menjadi nilai-nilai etis yang menjiwai kehidupan berbangsa (Madjid, 1970: 8). Dalam tradisi pemikiran Islam klasik, konsep siyasah (politik) menempatkan etika kekuasaan, keadilan, dan kemaslahatan umat sebagai prinsip utama. Ibn Khaldun dalam Muqaddimah mengemukakan bahwa kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang mampu menjaga solidaritas sosial (asabiyyah) dan mengedepankan keadilan distributif. Konsep ini kemudian diadaptasi oleh pemikir Islam modern Indonesia dalam konteks demokrasi Pancasila (Azra, 2006: 22).

Azyumardi Azra (2006) mencatat bahwa Islam Indonesia memiliki karakter yang khas diantaranya inklusif, toleran, dan berbasis tradisi pesantren yang mengakar kuat. Namun, globalisasi dan digitalisasi telah menghadirkan arus transnasional pemikiran Islam yang lebih puritan dan skripturalis, yang kemudian berinteraksi dengan dinamika politik lokal dan menghasilkan fenomena politisasi agama yang kompleks (Azra, 2006: 37). Studi Mujani, Liddle, dan Ambardi (2012) mengungkapkan bahwa identitas keislaman telah menjadi faktor penting dalam perilaku memilih masyarakat Indonesia, meskipun bukan satu-satunya faktor penentu. Instrumen agama dalam politik sering dimanfaatkan oleh elit untuk memobilisasi massa, terutama dalam kontestasi elektoral yang kompetitif (Mujani, Liddle & Ambardi, 2012: 154).

2.2 Politik Digital dan Ruang Publik Virtual

Jürgen Habermas dalam teori ruang publik (öffentlichkeit) mengemukakan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan ruang diskursif tempat warga negara dapat berdebat secara rasional dan setara. Media sosial secara teoritis menawarkan potensi demokratisasi ruang publik tersebut. Namun, dalam praktiknya, media digital justru sering menghadirkan distorsi komunikasi akibat dominasi kepentingan ekonomi-politik dan ketidaksetaraan akses (Habermas, dalam Hardiman, 2009: 133). Nasrullah (2015) mendefinisikan media sosial sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya,

berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Dalam konteks Indonesia, media sosial telah menjadi arena utama produksi dan distribusi opini publik, termasuk opini keagamaan dan politik (Nasrullah, 2015: 11).

Fenomena echo chamber (ruang gema) dan filter bubble dalam media sosial menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi. Algoritma platform seperti Facebook dan YouTube cenderung memperkuat konten yang sejalan dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan ruang informasi tertutup yang memperparah polarisasi. Penelitian Juditha (2018) menunjukkan bahwa penyebaran hoaks di Indonesia sangat masif dan mayoritas disebarakan melalui platform WhatsApp dan Facebook, dengan konten hoaks keagamaan sebagai yang paling banyak beredar (Juditha, 2018: 44). Buzzer politik merupakan fenomena khas dalam ekosistem media sosial Indonesia. Mereka adalah individu atau jaringan akun yang secara terorganisir menyebarkan narasi tertentu untuk kepentingan kelompok atau kandidat politik tertentu. Studi Tapsell (2017) menganalisis bagaimana industri media digital Indonesia dikuasai oleh oligarki yang memiliki kepentingan politik, sehingga independensi informasi menjadi semakin terancam (Tapsell, 2017: 189).

2.3 Moderasi Beragama dalam Islam

Konsep moderasi beragama dalam Islam bersumber dari nilai-nilai wasatiyyah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 143: "Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan (ummatan wasathan) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu." Ayat ini menjadi landasan teologis utama bagi pengembangan moderasi beragama dalam tradisi Islam (Kementerian Agama RI, 2019: 20). Kementerian Agama RI (2019) merumuskan moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem dalam beragama. Empat indikator utama moderasi beragama meliputi: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini menjadi basis pengukuran tingkat moderasi seorang individu maupun kelompok dalam konteks keIndonesiaan (Kementerian Agama RI, 2019: 43).

Nilai-nilai pokok moderasi beragama meliputi: tawassuth (mengambil jalan tengah), tasamuh (toleransi), tawazun (keseimbangan), dan i'tidal (keadilan). Nilai-nilai ini secara historis telah menjadi karakter Islam Nusantara yang dikembangkan oleh ormas-ormas Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Feillard dan Madinier (2011) mencatat bahwa kedua ormas tersebut telah berperan besar dalam memelihara moderasi Islam Indonesia sepanjang sejarah (Feillard & Madinier, 2011: 8). Dalam konteks digital, moderasi beragama menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Romli (2018) mengungkapkan bahwa konten keagamaan yang beredar di media sosial Indonesia cenderung dikuasai oleh narasi yang bersifat reaksioner, provokatif, dan eksklusif, sementara narasi moderasi yang inklusif kurang mendapat perhatian algoritmik karena dianggap kurang menarik secara emosional (Romli, 2018: 56).

2.4 Society 5.0 dan Transformasi Sosial

Konsep Society 5.0 pertama kali diperkenalkan oleh Cabinet Office Pemerintah Jepang pada 2016 sebagai visi masyarakat berbasis teknologi yang berpusat pada manusia (human-centered society). Dalam konsep ini, teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), robotika, dan big data diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan berbagai masalah sosial. Berbeda dengan Revolusi Industri 4.0 yang lebih menekankan efisiensi produksi, Society 5.0 menempatkan kualitas hidup manusia sebagai tujuan utama perkembangan teknologi (Prasetyo & Trisyanti, 2018).

Dalam konteks kehidupan beragama, Society 5.0 menghadirkan transformasi yang signifikan. Pergeseran otoritas pengetahuan keagamaan dari lembaga formal (pesantren, majelis taklim, ormas Islam) menuju individu-individu yang aktif di media digital merupakan salah satu implikasi terbesar. Wahid (2020) mencatat bahwa munculnya "ustadz digital" atau influencer agama yang memiliki jutaan pengikut di media sosial merupakan fenomena baru yang mengubah lanskap keagamaan Indonesia secara fundamental (Wahid, 2020: 51). Soenarso (2020) menganalisis bahwa di era Society 5.0, teknologi tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga cara manusia berpikir, bertuhan, dan membangun solidaritas sosial. Dalam konteks ini, pendidikan Islam harus mampu beradaptasi dan mengintegrasikan nilai-nilai digital literacy yang berbasis etika dan spiritualitas (Soenarso, 2020: 78).

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis konsep, teori, dan fenomena sosial-keagamaan yang membutuhkan pemahaman mendalam dan interpretatif, bukan pengukuran statistik (Moleong, 2007: 6). Pendekatan deskriptif-analitis dan kritis digunakan untuk mengidentifikasi dan menginterpretasikan relasi antara Islam, politik digital, dan moderasi beragama dalam konteks Society 5.0.

Sumber data primer penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel akademis, dan laporan lembaga resmi yang berkaitan dengan politik digital, moderasi beragama, dan Society 5.0. Sumber data sekunder mencakup berita media terpercaya, laporan survei lembaga riset, dan dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi digital yang sistematis. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan: (1) reduksi data untuk memilih informasi yang paling relevan; (2) klasifikasi tema berdasarkan pokok-pokok permasalahan; (3) analisis interpretatif-kritis untuk memahami makna di balik fenomena yang dikaji; dan (4) penarikan kesimpulan yang bersifat sintesis dan propositif. Kerangka analisis yang digunakan merujuk pada teori ruang publik Habermas, teori politik identitas, dan konsep wasatiyyah dalam tradisi Islam (Sugiyono, 2016: 338).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Transformasi Islam dalam Politik Digital

Transformasi relasi Islam dan politik di Indonesia dalam era digital dapat dipahami melalui pergeseran tiga arena: dari mimbar masjid ke media sosial, dari organisasi formal ke jaringan digital, dan dari otoritas ulama tradisional ke influencer agama. Ketiga pergeseran ini berlangsung secara simultan dan saling memperkuat, membentuk lanskap baru ekspresi dan mobilisasi politik berbasis agama. Media sosial telah menjadi alat mobilisasi politik umat Islam yang sangat efektif. Peristiwa Aksi Bela Islam (212) pada November 2016 merupakan salah satu contoh paling nyata bagaimana media digital khususnya WhatsApp dan Facebook mampu menggerakkan jutaan orang dalam waktu singkat untuk tujuan yang bersifat politis-religius. Studi Hasan (2018) menunjukkan bahwa aksi tersebut tidak lepas dari peran jaringan komunikasi digital yang terorganisir dan memanfaatkan narasi keagamaan sebagai pemersatu (Hasan, 2018: 102).

Demokratisasi informasi keagamaan yang dibawa oleh media digital memiliki dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi, setiap Muslim kini dapat mengakses pengetahuan agama dari berbagai sumber dan tokoh, tidak terbatas pada ulama lokal atau kitab-kitab klasik. Di sisi lain, kemudahan akses ini juga membuka ruang bagi penyebaran tafsir agama yang tidak tervalidasi, sektarian, bahkan ekstremis yang berpotensi memecah belah umat (Burhani, 2019: 67). Munculnya influencer agama sebagai aktor politik baru merupakan fenomena yang perlu dikaji secara kritis. Mereka hadir tanpa melalui proses legitimasi tradisional (ijazah keilmuan dari guru, sanad keilmuan yang jelas), namun memiliki pengaruh yang sangat besar berkat jumlah pengikut di media sosial. Fenomena ini menciptakan apa yang oleh Burhani (2019) disebut sebagai "krisis otoritas keagamaan" yang berdampak pada fragmentasi pemahaman keagamaan di kalangan masyarakat (Burhani, 2019: 71).

Agama tidak lagi hanya berfungsi sebagai nilai moral dan spiritual, tetapi telah berubah menjadi komoditas politik digital. Pesan-pesan keagamaan dikemas dalam format yang menarik secara visual dan emosional infografis, video pendek, meme untuk kemudian diedarkan secara viral dengan tujuan membangun atau menghancurkan citra politik tertentu. Tapsell (2017) menyebut fenomena ini sebagai bagian dari "economy of outrage" (ekonomi kemarahan) yang menjadi mesin penggerak konten digital viral di Indonesia (Tapsell, 2017: 201).

4.2 Tantangan Moderasi Beragama dalam Politik Digital

Tantangan moderasi beragama dalam pusaran politik digital bersifat multi-dimensional: teologis, struktural, dan algoritmik. Ketiga dimensi tantangan ini saling berjaln dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan tunggal.

4.2.1 Polarisasi Sosial Berbasis Agama

Polarisasi sosial berbasis identitas agama telah menjadi salah satu masalah paling serius dalam demokrasi Indonesia kontemporer. Survei Alvara Research Center (2017) menemukan bahwa sebanyak 72,7 persen pelajar dan mahasiswa Indonesia lebih memilih pemimpin Muslim dalam kehidupan publik, menunjukkan kuatnya identitas agama sebagai basis preferensi politik. Lebih mengkhawatirkan, sebagian responden menyatakan tidak keberatan jika Indonesia menjadi negara Islam (Burhani, 2019: 58).

Polarisasi ini diperparah oleh dinamika media sosial yang menciptakan echo chamber: setiap kelompok cenderung berkumpul dalam ruang informasi yang memperkuat keyakinan yang sudah ada, sementara pandangan yang berbeda secara otomatis tersaring oleh algoritma. Penelitian Lim (2017) menggambarkan pola ini sebagai "polarization machine" yang secara struktural memproduksi dan mereproduksi perpecahan sosial melalui mekanisme teknologi (Lim, 2017: 68).

4.2.2 Hoaks dan Disinformasi Keagamaan

Penyebaran hoaks berbasis agama merupakan salah satu ancaman terbesar bagi moderasi beragama di era digital. Kominfo mencatat ribuan konten hoaks yang beredar dalam setiap periode pemilu, dengan konten yang menyentuh sentimen keagamaan menjadi yang paling efektif secara viral. Juditha (2018) mengidentifikasi beberapa pola umum hoaks keagamaan: pemalsuan kutipan ulama atau tokoh agama, manipulasi ayat Al-Qur'an dan hadis untuk kepentingan politik, serta penyebaran narasi ancaman kepada agama Islam yang tidak berdasar (Juditha, 2018: 48).

4.2.3 Radikalisme Digital dan Ujaran Kebencian

Radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian (hate speech) berbasis agama telah menjadi masalah yang semakin serius di ruang digital Indonesia. Laporan Wahid Foundation (2020) mencatat peningkatan signifikan konten ujaran kebencian berbasis agama di media sosial, terutama menjelang dan sesudah kontestasi politik. Konten-konten tersebut tidak hanya menarget kelompok agama minoritas, tetapi juga menarget sesama Muslim yang dianggap berbeda pandangan politik (Wahid Foundation, 2020: 34). Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana konten radikalisme ini mulai menarget generasi muda. Penelitian BNPT (2021) menemukan bahwa generasi muda berusia 15-35 tahun merupakan kelompok yang paling rentan terhadap paparan konten radikalisme digital, mengingat tingginya intensitas penggunaan media sosial di kelompok usia ini (BNPT, 2021: 27).

4.2.4 Komodifikasi Agama Oleh Elit Politik

Instrumentalisasi agama oleh elit politik untuk kepentingan elektoral merupakan tantangan struktural yang paling sulit diselesaikan. Fenomena ini tidak semata-mata masalah individu, melainkan mencerminkan kegagalan sistem politik dalam membangun etika publik yang memisahkan kepentingan agama dari kepentingan kekuasaan. Mietzner (2018) menganalisis bahwa komodifikasi agama dalam politik Indonesia sudah berlangsung sejak era Reformasi, namun intensitasnya semakin meningkat dengan kehadiran media digital yang memungkinkan distribusi narasi agama secara masif dengan biaya yang relatif murah. Ia menyebut fenomena ini sebagai "weaponization of religion" (persenjataan agama) dalam kontestasi politik (Mietzner, 2018: 41).

Analisis kritis terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa algoritma media sosial secara struktural memperkuat segregasi ideologis. Platform digital dirancang untuk memaksimalkan engagement pengguna, yang berarti konten yang memancing emosi termasuk konten keagamaan yang provokatif akan cenderung mendapat prioritas distribusi dibandingkan konten yang moderat dan edukatif (Nasrullah, 2015: 76).

4.3 Peluang Moderasi Beragama di Era Society 5.0

Di balik berbagai tantangan yang ada, era Society 5.0 juga membuka peluang-peluang strategis bagi penguatan moderasi beragama. Teknologi, jika dikelola dengan bijaksana dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menyebarkan narasi Islam yang moderat, inklusif, dan konstruktif.

4.3.1 Media Digital Sebagai Sarana Dakwah Moderat

Potensi media digital sebagai sarana dakwah yang moderat dan inklusif sangat besar. Beberapa lembaga dan komunitas Islam di Indonesia telah berhasil memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten keagamaan yang ramah, kontekstual, dan menarik bagi generasi muda. Platform seperti YouTube, Instagram, dan podcast telah menjadi media dakwah baru yang mampu menjangkau audiens jutaan orang tanpa batas geografis (Romli, 2018: 89). Nahdlatul Ulama melalui berbagai unit kerjanya telah mengembangkan ekosistem media digital yang cukup kuat, antara lain NU Online yang menjadi salah satu portal keagamaan paling banyak dikunjungi di Indonesia. Konten-konten yang disajikan mengedepankan nilai-nilai Islam Nusantara: toleran, cinta tanah air, dan anti-kekerasan. Ini merupakan model dakwah digital yang patut diapresiasi dan dikembangkan lebih lanjut (Feillard & Madinier, 2011: 212).

4.3.2 Literasi Digital Berbasis Nilai Islam

Penguatan literasi digital menjadi salah satu peluang terpenting dalam menghadapi tantangan politik digital. Literasi digital yang dimaksud bukan sekadar kemampuan teknis menggunakan perangkat digital, tetapi kemampuan kritis dalam memilah, memverifikasi, dan mengevaluasi informasi yang diterima dari ruang digital. Hidayat (2016) menegaskan bahwa pendidikan Islam harus merespons tantangan digital dengan mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum pesantren dan madrasah. Pendekatan ini didasarkan pada nilai Islamic epistemology yang menekankan tabayyun (verifikasi informasi) sebagai kewajiban etis seorang Muslim. QS. Al-Hujurat ayat 6 memberikan dasar teologis yang kuat untuk pengembangan literasi digital Islami (Hidayat, 2016: 34).

4.3.3 Peran Perguruan Tinggi Islam

Perguruan tinggi Islam baik Universitas Islam Negeri (UIN), IAIN, STAIN, maupun perguruan tinggi Islam swasta memiliki peran strategis dalam pengembangan moderasi beragama digital. Sebagai lembaga yang mengintegrasikan keilmuan agama dan ilmu umum, perguruan tinggi Islam dapat menjadi pusat produksi konten akademis yang merespons isu-isu keagamaan kontemporer dengan perspektif yang kritis dan moderat (Suprayogo, 2013: 15). Pengembangan kajian Islam Nusantara sebagai tradisi intelektual yang khas Indonesia juga menjadi kontribusi penting perguruan tinggi Islam dalam penguatan moderasi beragama. Melalui publikasi ilmiah, seminar, dan produksi konten digital, perguruan tinggi Islam dapat menjadi benteng intelektual melawan narasi ekstremisme yang mengklaim sebagai representasi otentik Islam (Azra, 2006: 198).

4.3.4 Kolaborasi Lintas Sektor

Penguatan moderasi beragama di era digital membutuhkan kolaborasi yang solid antara pemerintah, ormas Islam, akademisi, dan komunitas digital. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan berbagai program literasi digital dan moderasi beragama, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui sinergi yang lebih konkret dengan aktor-aktor non-pemerintah (Kementerian Agama RI, 2019: 67).

4.4 Rekonstruksi Moderasi Beragama di Ruang Digital

Berdasarkan analisis di atas, rekonstruksi moderasi beragama di ruang digital memerlukan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-deklaratif menuju pendekatan struktural transformatif. Moderasi beragama tidak boleh berhenti pada slogan dan deklarasi, tetapi harus mampu merespons secara konkret mekanisme struktural yang memproduksi polarisasi dan radikalisme dalam ekosistem digital. Pertama, reorientasi dakwah dari retorika emosional menuju edukasi kritis. Tokoh dan lembaga agama perlu mengembangkan model komunikasi yang tidak hanya menarik secara emosional, tetapi juga mendorong audiens untuk berpikir kritis dan reflektif. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi keilmuan Islam klasik yang menekankan pentingnya ta'aqqul (penalaran) dalam memahami teks dan konteks agama.

Kedua, penguatan etika digital Islam. Diperlukan pengembangan panduan etis yang komprehensif tentang bagaimana seorang Muslim seharusnya berperilaku di ruang digital: tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan ujaran kebencian, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, dan menjaga persaudaraan (ukhuwwah) dalam perbedaan. Panduan ini perlu disebarluaskan melalui berbagai saluran, dari khutbah Jumat hingga konten media sosial yang menarik (Hidayat, 2016: 89).

Ketiga, membangun budaya dialog dalam ruang virtual. Moderasi beragama harus diwujudkan dalam praktik-praktik konkret: membangun forum diskusi lintas identitas, menghadirkan perspektif yang beragam dalam konten digital keagamaan, dan mendorong kolaborasi antara tokoh agama dari berbagai aliran dan organisasi.

Keempat, memperkuat narasi Islam kebangsaan. Islam di Indonesia memiliki keunikan historis yang luar biasa: ia tumbuh dalam interaksi dengan tradisi lokal, nilai-nilai Pancasila, dan semangat kebangsaan yang pluralistik. Narasi ini perlu diperkuat dan disebarkan secara massif dalam ruang digital sebagai counter-narrative terhadap ideologi transnasional yang memandang nasionalisme sebagai taghut (sesembahan selain Allah) (Madjid, 1970: 42). Moderasi beragama pada akhirnya harus bergerak dari slogan administratif menuju gerakan intelektual dan sosial digital yang berjangkar pada tradisi Islam Nusantara yang kaya, terbuka, dan ramah terhadap kebhinekaan. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka menjaga keutuhan sosial dan demokrasi Indonesia di tengah pusaran politik digital yang semakin kompleks.

5. Kesimpulan

Penulis Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal pokok sebagai berikut.

Pertama, politik digital telah mentransformasi relasi Islam dan politik di Indonesia secara fundamental. Media sosial telah menggeser arena politik dari ruang formal ke ruang virtual, mengubah otoritas keagamaan dari ulama tradisional ke influencer digital, dan mengubah agama dari nilai moral menjadi komoditas politik yang dapat dikemas dan didistribusikan secara viral. Kedua, media sosial memperluas partisipasi politik umat Islam, tetapi juga memicu polarisasi dan konflik identitas yang mengancam kohesi sosial. Mekanisme algoritmik platform digital secara struktural memperkuat echo chamber dan filter bubble yang memperdalam segregasi ideologis berbasis agama.

Ketiga, tantangan moderasi beragama tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga struktural akibat sistem algoritma digital dan kepentingan politik elit yang memanfaatkan agama sebagai instrumen mobilisasi massa. Moderasi beragama yang efektif harus mampu merespons tantangan struktural ini, bukan sekadar mengkampanyekan nilai-nilai moderat secara normatif.

Keempat, Society 5.0 membuka peluang baru bagi penguatan Islam moderat melalui teknologi digital, jika dikelola secara kritis, humanis, dan berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan. Potensi media digital sebagai sarana dakwah moderat, pengembangan literasi digital Islami, dan kolaborasi lintas sektor merupakan peluang yang harus dioptimalkan.

Kelima, diperlukan reconstruksi paradigmatis moderasi beragama dari pendekatan normatif-deklaratif menuju gerakan intelektual dan sosial digital yang konkret: penguatan literasi digital berbasis nilai Islam, reorientasi dakwah menuju edukasi kritis, pengembangan etika digital Islam, dan memperkuat narasi Islam kebangsaan sebagai counter-narrative terhadap ekstremisme.

Referensi

- Alvara Research Center. (2017). *Indonesia 2020: The urban middle-class millennials*. Alvara Research Center.
- Azra, A. (2006). *Islam in the Indonesian world: An account of institutional formation*. Mizan.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). *Laporan tahunan BNPT 2021: Peta radikalisme dan terorisme di Indonesia*. BNPT.
- Burhani, A. N. (2019). Plural Islam and contestation of religious authority in Indonesia. Dalam G. Fealy & S. White (Eds.), *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia* (hlm. 1–16). ISEAS.
- Feillard, A., & Madinier, R. (2011). *The end of innocence? Indonesian Islam and the temptation of radicalism*. University of Hawaii Press.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi deliberatif: Menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jürgen Habermas*. Kanisius.
- Hasan, N. (2018). Islam, politik, dan keindonesiaan. Dalam N. Hasan (Ed.), *Ulama dan negara-bangsa: Membaca masa depan Islam politik di Indonesia* (hlm. 1–28). PusPIDeP.
- Hidayat, K. (2016). *Psikologi beragama: Menjadikan hidup lebih nyaman dan santun*. Hikmah.
- Juditha, C. (2018). Hoax communication interactivity in social media and anticipation (Interaksi komunikasi hoaks di media sosial serta antisipasinya). *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31–44.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

- Lim, M. (2017). Freedom to hate: Social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 411–427. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>.
- Madjid, N. (1970). Keharusan pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat. ISPI.
- Mietzner, M. (2018). Authoritarian innovations in Indonesia: Electoral narrowing, bans on ideological pluralism and the usurpation of executive power. *Democratization*, 26(9), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1548182>.
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2018). Explaining the 2016 Islamist mobilisation in Indonesia: Religious intolerance, militant groups and the politics of accommodation. *Asian Studies Review*, 42(3), 479–497. <https://doi.org/10.1080/10357823.2018.1473335>.
- Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2012). Kuasa rakyat: Analisis tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca-Orde Baru. Mizan Publika.
- Nasrullah, R. (2015). Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi. Simbiosis Rekatama Media.
- Prasetyo, H., & Trisyanti, W. (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. Dalam Prosiding SEMATEKSOS 3: Strategi pembangunan nasional menghadapi revolusi industri 4.0 (hlm. 1–7). Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Romli, K. (2018). Komunikasi massa. Grasindo.
- Soenarso, H. A. (2020). Society 5.0: Konsep, tantangan, dan implikasinya bagi pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 70–85.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Suprayogo, I. (2013). Pengembangan pendidikan karakter. UIN-Maliki Press.
- Tapsell, R. (2017). Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution. Rowman & Littlefield.
- Wahid, D. (2020). Challenging religious authority in Indonesia: The role of Salafi ustadz. *Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions*, 23(2), 38–56.
- Wahid Foundation. (2020). Potensi intoleransi dan radikalisme sosial-keagamaan di kalangan Muslim Indonesia. Wahid Foundation.
- Ariani, M., & Nurdin, N. (2022). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Penyerapan Anggaran*. Paper presented at the Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Palu.
- Herminingsih, H., Askar Askar, Nurdin, N., & Saguni, F. (2022). *Peran Teori Belajar Deskriptif Dan Preskriptif Dalam Pendidikan*. Paper presented at the Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Palu.
- Jumahir, J., Nurdin, N., & Syahid, A. (2022). *The Role Of The Principal In The Development Of Religious Culture In Man 1 Banggai*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Makmur, M., Nurdin, N., & Pettalongi, A. (2022). *Islamic Education Values In Sintuwu Maroso Culture*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Nurdin, N. (2022). *Impact of Internet Development on Muslim Interaction with Islam*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Nurdin, N., & Basalamah, R. (2022). *Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Financial Technology (Fintech) Go-Pay Pada Generasi Milenial*. Paper presented at the Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0, Palu.
- Nurdin, N., & Jannah, M. (2022). Pengaruh Kualitas dan Fasilitas Website Shopee terhadap Kepuasan Konsumen. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(5), 473–484.
- Nurdin, N., & Pettalongi, S. S. (2022). Interpretive case study to understand online communication in an e-tendering project implementation. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 7(1), 39–54.
- Nurfaiqah, N., Nurdin, N., & Alhabsyi, F. (2022). *Management of Al-Qur'an Learning at One Day One Juz Palu Community*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Palinge, E., Nurdin, N., & Rusdin, R. (2022). *The Importance of Islamic Education to the Early Childhood*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Pratama, M. W., Pettalongi, S. S., & Nurdin, N. (2022). *Integrated Curriculum in Pondok Pesantren with the Mu'allimin System (Study the Curriculum of Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor 11 Poso)*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.
- Rahmawati, R., Nurdin, N., & Pettalongi, A. (2022). *Science Learning Methods in Kindergarten Schools (Study at: Khalifah Kindergarten in Palu City 2021)*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.

- Rustina, Nurdin, N., Suharnis, Samsinas, Murniati, Kasmiati, & Elya. (2026). The role of families in narrating Kaili ethnic oral traditions to strengthen religious education at elementary schools: an ethnography from two villages in Indonesia. *Cogent Arts & Humanities*, 13(1), 2610053. doi:10.1080/23311983.2025.2610053
- Santoso, F. N. C., Nurdin, N., & Pettalongi, A. (2022). *Implications of the Implementation of Multicultural-Based Islamic Education in SMA Negeri 4 and SMKN 1 Poso*. Paper presented at the Proceeding of International Conference on Islamic and Interdisciplinary Studies, Palu.